

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian atau riset dari pembahasan di atas bahwa Kinerja Aparat Dinas Sosial dalam melakukan pembinaan Pengemis di Kota Gorontalo itu sudah dilakukan secara bertahap yaitu setahun sekali oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Gorontalo. Namun, program pembinaan yang dilakukan belum bisa berjalan secara efektif dikarenakan adanya beberapa faktor yang menghambat Aparat Dinas Sosial dalam melakukan pembinaan pengemis di Kota Gorontalo.

Kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Sosial dalam melakukan pembinaan pengemis dilakukan dengan beberapa usaha seperti memberikan dana usaha dengan mengikuti tahapan-tahapan dalam pembinaan seperti mengikuti bimbingan mental, bimbingan kesehatan, bimbingan ketertiban, dan bimbingan terhadap para pengemis Kota Gorontalo. Hal ini perlu juga ditingkatkan, agar para pengemis dapat merasakan kinerja atau usaha-usaha yang diberikan oleh pemerintah secara merata.

Namun ada pula faktor-faktor yang menjadi penghambat Kinerja Aparat Dinas Sosial Dalam Melakukan Pembinaan Pengemis di Kota Gorontalo. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah belum adanya Peraturan Daerah (Perda) khusus mengenai pengemis, sehingga fasilitas-fasilitas pendukung seperti rumah singgah atau panti rehabilitasi belum ada. Kemudian hambatan lain yaitu tidak adanya kerja sama dengan instansi terkait seperti Satpol PP membuat proses pembinaan yang dilakukan oleh Aparat Dinas Sosial tidak berjalan efektif karena

seharunya Satpol PP bertugas untuk melakukan penertiban pengemis dan Aparat Dinas Sosial yang melakukan pembinaan.

Untuk mencapai keberhasilan dalam program pembinaan pengemis di Kota Gorontalo, seharusnya Dinas Sosial menggandeng Pemerintah untuk bisa membuat suatu terobosan rancangan Perda (Peraturan Daerah) khusus mengenai pengemis agar fasilitas-fasilitas pendukung seperti, rumah singgah atau panti rehabilitasi bisa di bangun. Sehingga pembinaan bisa terlaksana secara maksimal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah :

1. Seharusnya pemerintah membangun panti rehabilitasi untuk para pengemis khususnya di Kota Gorontalo agar mempermudah pihak dinas sosial untuk melakukan penanggulangan para pengemis, baik dalam hal pembinaan dan pemberdayaan.
2. Dalam melakukan program pembinaan pengemis seharusnya pihak pemerintah dapat membuat Peraturan Daerah (Perda) agar regulasi ini dapat digunakan untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu.
3. Perlu dilakukan pelatihan kepada seluruh pengemis yang terjaring guna peningkatan kualitas SDM, terutama di dinas sosial agar dapat melakukan penanganan pengemis dengan maksimal.

4. Pemerintah khususnya Dinas Sosial Kota Gorontalo seharusnya mendorong agar Instansi terkait seperti Satpol PP bisa ikut berkontribusi dalam hal penertiban pengemis.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, 2013, *Efektivitas Penyelenggaraan Public Pada Samsat Corner Wilayah Kota Malang*. Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM
- Asmawi,M. 2003. *Persoalan Kemiskinan Dalam Orientasi Kebijakan pembangunan*. Bandung, Majalah Ilmiah PDP Unpad Prakarsa
- Bastaman, Hanna P. 2000, *Meraih hidup bermakna kisah pribadi dengan pengalaman tragis*, Jakarta: paradigma
- Ilyas, Y, 1999. *Kinerja : Teori penilaian dan penelitian*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Koewara E, 2002, *Logoterapi, psikoterapi viktor Frankl.,* Yogyakarta : Kanisius
- Mangkunegara,AnwarPrabu. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakara
- Pasolong.Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*, Bandung:Alfabeta
- Sedarmayanti. 2010. *Manajemen sumber Daya Manusia*, Bandung: RefikaAditama
- Sugiyono, *metode penelitian pendidikan (pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Suharsaputra,Uhar. 2014. *Metode Penelitian Sosial (Kualitatif, Kuantitatif, dan Tindakan)*. Bandung: Refika Aditama
- Usman,Husnaini. 2009, *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*. Jakarta: BumiAksara
- Mulyadi, 2007. *Akuntansi Biaya* , Edisi ke 3. Yogyakarta: STIE YKPN. 63
- Dokumen**
- Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Daerah No. 1 tahun 2014, Penanganan Gelandangan dan Pengemis DIY

Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 13 Tahun 2008

Peraturan daerah nomor 1 tahun 2018 tentang ketertiban umum

Sumber lain

Administrasi Public Vol. 4 No. 2 (2016) : 105-119 oleh Chairika Nasution dan Husni Thamrin

BryanNovedion, 2016. Skripsi *Upaya Pembinaan Gepeng oleh Camp Assement Dinas Sosial DIY*

PrihandaraAmi, 2012. Skripsi *Kinerja Dinas Sosial dalam pembinaan Anak Jalanan DI Kota Serang*

Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2017) oleh Khoiron

Dwidinanti Vol 3, No 1 (2016) Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

LokonHugi, 2012. Skripsi *Pengaruh Efisiensi Pelayanan Publik Terhadap Efektivitas kerja pegawai kelurahan DKI Jakarta*

Modul pelayanan dan pelayanan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis panti, (Jakarta ;2010)

Muh.Sabar, 2015. Skripsi *Kinerja dina sosial dalam pelaksanaan program pembinaan anak jalan di kota makassar*

Pelaksanaan peraturan DIY No. 1 tahun 2014 dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta. <https://repository.umy.ac.id/handle/>

UmiSupratiningsih. Jurnal *Nuansa*, Vol. 13 No. 2 (2016)

<https://www.banyuwangikab.go.id/skpd/unit/10601/dinas-sosial.html> Diakses pada 16 November 2019

<http://www.academia.edu/4547904/Gelandangan>. diunduh tanggal 16 November 2019

<http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf> Diakses pada 3 januari 2020

<http://mastergocapricorn.blogspot.com/2012/09/landasan-teori.html> Diakses pada 3 januari 2020